



RENCANA PROGRAM KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020–2024



Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman

Jl. Candisari No.14, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55511

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Program Kerja Tahun 2020 – 2024 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman (BNNK Sleman) ini dapat diselesaikan. Rencana Program Kerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan berbagai potensi/ kekuatan, hambatan serta peluang yang ada dan kemungkinan akan timbul. Penyusunan Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman ini didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020 – 2024.

Tujuan penyusunan Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman ini adalah sebagai perangkat untuk menjabarkan tentang visi, tujuan, kebijakan dan strategi operasional, sasaran yang akan dicapai serta berbagai upaya yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Selain itu, dokumen Rencana Program Kerja dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan setiap tahunnya sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Selanjutnya, kami mengharapkan agar seluruh jajaran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman dapat mempedomani dan secara konsisten dapat melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan tertuang dalam Rencana Program Kerja ini. Akhir kata, semoga dokumen Rencana Program Kerja ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman dan masyarakat Kabupaten Sleman pada umumnya.

Sleman, Desember 2020

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Sleman**



Siti Alfiah, S.Psi., SH., MH

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	4
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	6
BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL	9
2.1. Tujuan Organisasi	9
2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Operasional	10
BAB III RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN	14
3.1. Rencana Kinerja.....	14
3.2. Rencana Kebutuhan Pendanaan	14
BAB IV PENUTUP	15
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020 – 2024 mengamanatkan bahwa setiap Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota (BNNK) perlu menyusun rencana program kerja Tahun 2020 – 2024, maka berdasarkan Peraturan tersebut Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sleman menyusun rencana program kerja Tahun 2020 – 2024.

Rencana program kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran serta dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi kinerja BNN Kabupaten Sleman dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai tugas pokok dan fungsi. Dokumen rencana program kerja BNN Kabupaten Sleman bersifat indikatif yang memuat program dan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Dalam penyusunan rencana program kerja, BNN Kabupaten Sleman telah mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang terdapat di wilayah Kabupaten Sleman serta disesuaikan dengan Kebijakan Strategi Nasional Program P4GN.

Sejalan dengan arah dan kebijakan strategi nasional program P4GN, BNN Kabupaten Sleman telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis Tahun 2020 – 2024. Adapun tujuan yang ditetapkan yaitu :

1. Melindungi dan menyelamatkan masyarakat Kabupaten Sleman dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Mewujudkan transformasi layanan publik yang berkualitas.

Sedangkan sasaran strategis yang ditetapkan yaitu :

1. Meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Kabupaten Sleman.
2. Terwujudnya manajemen organisasi, profesional, produktif, dan proporsional serta berkinerja tinggi.

Selain memiliki tujuan dan sasaran strategis tersebut, BNN Kabupaten Sleman juga telah mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Pembangunan Zona Integritas pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business proses*) dan sumber daya manusia aparatur, sebagaimana esensi dari reformasi birokrasi yakni integritas, etos kerja dan gotong royong yang diharapkan mampu memberikan manfaat sekurang-kurangnya dapat diperoleh sebuah implementasi birokrasi yang di dalamnya menggambarkan proses demokratisasi, efektivitas dan efisiensi birokrasi, transparansi dan akuntabilitas serta tanggungjawab dalam kerangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

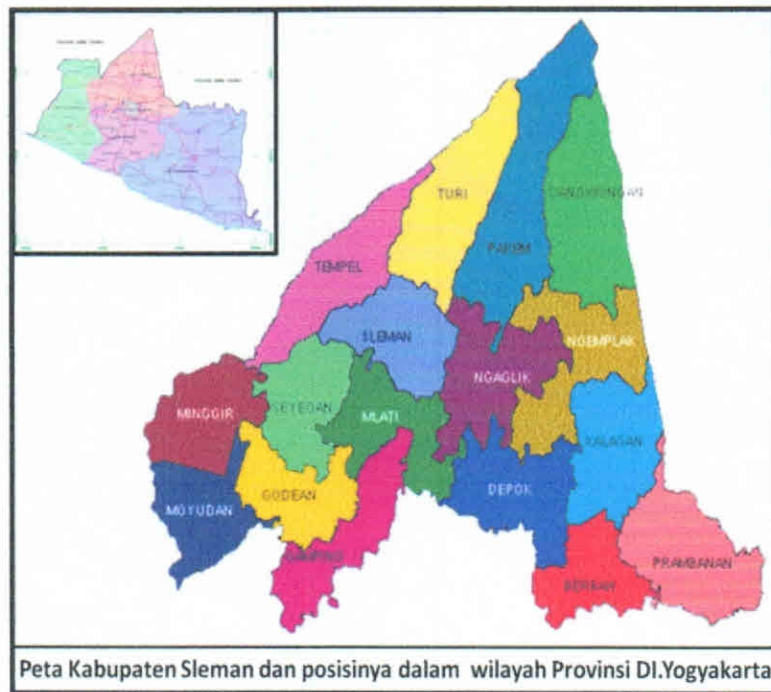
Dengan demikian, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis BNN Kabupaten Sleman perlu diselaraskan dengan pembangunan Zona Integritas, sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BNN Kabupaten Sleman dapat terintegrasi dan terlaksana dengan baik kedepannya. Dengan begitu, dokumen rencana program kerja yang ditetapkan oleh BNN Kabupaten Sleman memiliki peran penting sebagai dasar/ acuan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis secara berkelanjutan.

1.1 Kondisi Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1998, Kabupaten Sleman merupakan bagian dari wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas wilayah ± 57.482 Ha. Letak geografis Kabupaten Sleman sangat strategis yaitu bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta Provinsi D.I. Yogyakarta dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta dan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai Kabupaten yang terletak di sebelah utara Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Jumlah

penduduk Kabupaten Sleman adalah 1.141.718 jiwa, terdiri dari 574.913 laki-laki dan 566.805 perempuan. Dengan luas wilayah 57.482 Ha, maka kepadatan penduduk Kabupaten Sleman adalah 1.986 jiwa per km².



Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Sleman

Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan, wilayah Kabupaten Sleman merupakan wilayah hulu kota Yogyakarta dan dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Wilayah agromenasi perkotaan Yogyakarta, yang meliputi Kecamatan Depok, Gamping, serta sebagian wilayah Kecamatan Ngaglik, Ngemplak, Kalasan Berbah, Sleman, dan Mlati.
2. Wilayah sub-urban, meliputi kota Kecamatan Godean, Sleman, dan Ngaglik, yang terletak cukup jauh dari kota Yogyakarta dan berkembang menjadi tujuan kegiatan masyarakat di wilayah kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan.
3. Wilayah fungsi khusus atau wilayah penyangga (*buffer zone*) meliputi Kecamatan Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan, yang merupakan pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya.

Letak strategis wilayah Kabupaten Sleman dengan banyaknya Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta dengan mahasiswa yang berasal dari seluruh Indonesia dapat menjadi potensi ancaman terhadap peredaran/ penyalahgunaan narkoba. Selain karena luasnya wilayah Kabupaten Sleman termasuk yang terbesar di DIY, keberadaan bandara di wilayah Kabupaten Sleman pun dapat menjadi pintu masuk pula. Seperti kita ketahui bahwa sasaran utama dari para pelaku kejahatan narkoba adalah para pendatang yang mencari pendidikan dan pekerjaan di Kabupaten Sleman. Usia terbanyak antara 20-39 tahun berstatus pekerja dan mahasiswa. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran status pengguna narkoba yang sebelumnya ditempati pelajar dan mahasiswa. Jenis narkoba terbanyak yang diminati dan dikonsumsi adalah Sabu-Sabu dan Heroin.

Permasalahan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Sleman masih menjadi ancaman tersendiri. Kondisi ini sejalan dengan banyaknya penyelundupan narkoba jenis sabu yang digagalkan dan yang beredar di DIY. Dampak dari penyalahgunaan narkoba di DIY antara lain: meningkatnya angka kriminalitas, depresi, dan tertularnya berbagai macam penyakit dan bahkan kematian. Untuk itu, BNN Kabupaten Sleman perlu melakukan upaya-upaya dalam menanggulangi permasalahan narkoba tersebut melalui program-program yang dituangkan dalam Rencana Program Kerja 5 (lima) Tahunan.

1.2 Potensi dan Permasalahan

A. Potensi

Capaian kinerja tentang pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika oleh BNN Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2020 menunjukkan hasil yang relatif nyata. Hal tersebut disebabkan kondisi dinamis dari potensi yang dimiliki BNN Kabupaten Sleman baik internal maupun eksternal dalam penyelesaian permasalahan dan identifikasi permasalahan yang akan dihadapi dalam periode 5 (lima) tahunan kedepan. Berdasarkan identifikasi permasalahan lima tahun ke depan, terdapat sejumlah potensi

yang dapat dimanfaatkan oleh BNN Kabupaten Sleman dalam mewujudkan capaian kinerja yang optimal, yakni:

1. Meningkatnya komitmen politik dalam upaya penanganan permasalahan narkoba melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020 – 2024.
2. Meningkatnya dukungan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman melalui Peraturan Bupati Nomor 13.2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Adanya perjanjian kerjasama dan dukungan kebijakan dari berbagai *stakeholder*, sehingga pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dapat dilakukan secara *integratif* dan *kolaboratif*.

B. Permasalahan

Selain memiliki potensi dalam upaya P4GN, BNN Kabupaten Sleman juga memiliki tantangan yang akan dihadapi kedepan berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang ada. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya tempat hiburan di Kabupaten Sleman menjadi daya tarik untuk memperdagangkan narkoba.
2. Keterbatasan sumber daya anggaran dan sumber daya manusia menyebabkan pengawasan peredaran gelap narkoba di wilayah Kabupaten Sleman yang luas belum dapat dilakukan secara maksimal.
3. Masih terdapat anggapan bahwa penanganan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba hanya dilakukan BNN Kabupaten Sleman.

4. Nilai ekonomi narkoba yang tinggi menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk memperdagangkan narkoba.
5. Sikap dan perilaku masyarakat yang cenderung menutupi adanya penyalahgunaan narkoba yang ada di lingkungan sekitarnya dikarenakan adanya perasaan malu dan takut.
6. Belum maksimalnya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk dukungan sumber daya anggaran dan lainnya untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
7. Terbatasnya fasilitas rehabilitasi yang sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
8. Kesepemahaman antar aparat penegak hukum dalam penerapan hukuman rehabilitasi terhadap penyalahguna dan/ atau pecandu narkoba yang masih rendah, sehingga upaya penyelamatan penyalahguna dan/ atau pecandu narkoba melalui rehabilitasi belum maksimal.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

Dalam upaya penanggulangan permasalahan narkoba, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia telah menjabarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang merupakan bagian dari perencanaan nasional baik jangka panjang maupun jangka menengah. Pada RPJMN 2020-2024, BNN sebagai institusi yang mengemban amanah dalam menanggulangi permasalahan narkoba merupakan salah satu bagian dari 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yang ditetapkan pemerintah, yakni “Memperkuat Stabilitas Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik”.

Setiap agenda pembangunan memiliki program prioritas nasional. Demikian juga dengan BNN yang telah menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam agenda pembangunan ketujuh tersebut yaitu melalui kegiatan Prioritas Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang secara kontekstual diharapkan dapat dicapai melalui upaya penurunan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dari 1,86 (Tahun 2020) menjadi 1,69 (Tahun 2024). Dalam upaya penurunan angka prevalensi khususnya di wilayah Kabupaten Sleman, BNN Kabupaten Sleman juga mengambil peranan dengan menetapkan upaya peningkatan ketahanan masyarakat melalui beberapa cara, antara lain : 1) Meningkatkan kesadaran/ merubah paradigma masyarakat; 2) Meningkatkan peran masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam inovasi deteksi dini, rehabilitasi, dan edukasi/ pendidikan anti narkoba; 3) Meningkatkan peran institusi pendidikan dalam mengembangkan ketrampilan psikologis dan pendidikan anti narkoba.

2.1. Tujuan Organisasi

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, terdapat 2 (dua) tujuan organisasi BNN yaitu:

- A. Melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Adapun sasaran strategi dari tujuan tersebut adalah meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tujuan dan strategis tersebut dalam rangka mewujudkan masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Dalam hal ini, upaya penguatan ketahanan masyarakat harus terus ditingkatkan. Selain itu, integrasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan sangat penting untuk terus ditingkatkan dalam rangka menekan pasar gelap narkoba terutama dari sisi supply melalui tindakan penangkapan dan pemberantasan jaringan peredaran gelap narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti beserta aset tersangka tindak pidana narkotika.
- B. Mewujudkan transformasi layanan publik yang berkualitas. Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional serta berkinerja tinggi. Tujuan dari sasaran strategis ini mempresentasikan fokus kinerja kelembagaan BNN yang berorientasi pada hasil kinerja yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Penguatan kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi ini akan memberikan wajah transformatif kelembagaan yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik di lingkungan BNN.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut merupakan fokus yang harus dicapai BNN bersama seluruh perangkat organisasinya baik pada tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/ kota. Dalam hal ini, BNN Kabupaten Sleman sebagai salah satu unit vertikal organisasi BNN berkewajiban mengerahkan seluruh sumber daya dan kekuatannya untuk mencapai target organisasi yang telah ditetapkan.

2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Operasional

Kebijakan dan strategi operasional BNN Kabupaten Sleman merupakan rumusan penjabaran dari kebijakan dan strategi BNN. Adapun kebijakan dan strategi BNN tahun 2020-2024 adalah:

- A. Penguatan pengawasan jalur penyelundupan narkoba;
- B. Peningkatan kualitas penindakan kejahatan narkoba;
- C. Pembangunan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat;
- D. Peningkatan kapabilitas rehabilitasi;
- E. Penguatan sinergi dan kolaborasi stakeholder.

Kebijakan dan strategi BNN yang bersifat makro tersebut disesuaikan dengan kondisi aktual permasalahan narkoba yang terdapat di wilayah Kabupaten Sleman. Selain itu, dalam rumusan kebijakan dan strategi BNN Kabupaten Sleman juga menyelaraskan dengan kebijakan BNN yang berorientasi pada penguatan pelaksanaan P4GN dan peningkatan kapasitas organisasi BNN.

Dalam hal ini, kebijakan dan strategi yang dirumuskan BNN Kabupaten Sleman sifatnya sangat kontekstual dan disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik wilayah Kabupaten Sleman. Adapun kebijakan dan strategi operasional BNN Kabupaten Sleman sebagai berikut:

A. Kebijakan

Dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional tentang penanganan permasalahan Narkoba 2015-2019 dan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis kelembagaan, maka ditetapkan arah kebijakan BNN periode 2020-2024 sebagai berikut:

- a. Penanganan permasalahan Narkoba secara seimbang antara *demand reduction* dan *supply reduction*.
- b. Mengembangkan berbagai upaya dalam penanganan permasalahan narkoba secara holistic, integral, dan berkelanjutan.
- c. Mengedepankan profesionalisme, dedikasi, dan tanggung jawab dalam penanganan permasalahan narkoba.

Dalam melaksanakan kebijakan tersebut di atas, BNN telah merumuskan strategi:

- a. Mengekstensifikasi dan intensifikasi informasi P4GN kepada seluruh lapisan masyarakat;

- b. Menumbuhkembangkan kepedulian dan kemandirian masyarakat dalam rangka pelaksanaan P4GN;
- c. Mengembangkan akses layanan rehabilitasi penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba yang terintegrasi dan berkelanjutan;
- d. Mengungkap jaringan sindikat narkoba dan menyita seluruh aset terkait kejahatan narkoba;
- e. Menjalin kemitraan yang harmonis dan sinergis dengan berbagai komponen baik dalam maupun luar negeri dalam rangka optimalisasi pelaksanaan P4GN;
- f. Melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi *good governance* dan *clean government* di lingkungan Badan Narkotika Nasional;

Dalam rangka mengimplementasikan rumusan strategis tersebut, BNN Kabupaten Sleman memfokuskan kebijakan P4GN pada tahun 2020-2024, sebagai berikut:

- a. Bidang Pencegahan, fokus terhadap:
 - 1. Upaya menjadikan para pemangku kebijakan pada kelompok masyarakat yang aktif mendukung pembangunan berwawasan anti narkoba.
 - 2. Upaya menjadikan para pemangku kebijakan pada institusi pendidikan yang aktif mendukung pembangunan berwawasan anti narkoba.
 - 3. Upaya menjadikan siswa/pelajar menengah dan mahasiswa yang berperilaku hidup sehat dan tidak menyalahgunakan narkoba.
 - 4. Upaya menjadikan para pekerja yang berperilaku hidup sehat dan tidak menyalahgunakan narkoba.
 - 5. Upaya menjadikan keluarga yang berperilaku hidup sehat dan tidak menyalahgunakan narkoba.
 - 6. Upaya menjadikan masyarakat rentan yang berperilaku hidup sehat dan tidak menyalahgunakan narkoba.

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Upaya menjadikan penggiat (relawan) aktif yang melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan instansi pemerintah.
2. Upaya menjadikan penggiat (relawan) aktif yang melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan dunia usaha/ swasta.
3. Upaya menjadikan penggiat (relawan) aktif yang melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat.
4. Upaya menjadikan penggiat (relawan) aktif yang melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan.

c. Bidang Rehabilitasi

1. Upaya memberikan pelayanan rehabilitasi rawat jalan/ rawat inap baik secara medis maupun sosial kepada pecandu narkoba/ penyalahguna/ korban penyalah guna.
2. Upaya meningkatkan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara prioritas berdasarkan kerawanan daerah penyalahgunaan narkoba.
3. Upaya memberikan pelayanan rehabilitasi baik secara medis maupun secara sosial yang diharapkan dapat kembali produktif dalam kehidupan masyarakat.

d. Bidang Pemberantasan

1. Upaya terhadap pengungkapan kasus tindak pidana peredaran gelap narkoba yang terungkap dan diselesaikan.
2. Upaya peningkatan kerjasama antar penegak hukum untuk menghindari kesenjangan di lapangan.

BAB III

RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

1.1 Rencana Kinerja

BNN Kabupaten Sleman menetapkan rencana kinerja sesuai dengan arsitektur dan struktur kinerja BNN periode Tahun 2020-2024. Desain rencana kinerja BNN Kabupaten Sleman menggunakan pendekatan *cascading* kinerja sebagai penjabaran dari sejumlah kinerja kegiatan yang dimandatkan ke unit kerja vertikal BNN tingkat Kabupaten/ Kota.

Rencana target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Program Kerja BNN Kabupaten Sleman merupakan gambaran dan proyeksi target kinerja pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Kabupaten Sleman.

Adapun rencana target kinerja BNN Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024 disajikan dalam bentuk matrik rencana kinerja sebagaimana terlampir.

1.2 Rencana Kebutuhan Pendanaan

Rencana kebutuhan pendanaan di BNN Kabupaten Sleman tahun 2020-2024 kurang lebih sebesar 1.800.000.000 setiap tahunnya, yang tersebar pada 4 fungsi. Rencana kebutuhan pendanaan tersebut difokuskan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan BNN Kabupaten Sleman baik di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, pemberantasan dan rehabilitasi.

Selain itu, rencana kebutuhan pendanaan juga untuk mendukung operasional rutin perkantoran. Adapun kebutuhan pendanaan di unit kerja BNN Kabupaten Sleman tahun 2020-2024 secara rinci disajikan dalam bentuk lampiran matrik rencanak kebutuhan pendanaan.

PENUTUP

LAMPIRAN
MATRIK RENCANA KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020-2024

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
KERANGKA RENCANA KINERJA BIDANG PENCEGAHAN								
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	50,03	51	52	53	53,51
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan faktor risiko penyalahgunaan narkoba	N/A	+0,01	+0,01	+0,01	+0,01
KERANGKA RENCANA KINERJA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT								
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,10	3,15	3,20	3,25	3,30
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Status keterpulihan kawasan rawan dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	NA	NA	NA	NA	NA
KERANGKA RENCANA KINERJA BIDANG REHABILITASI								
5.	Pengembangan fasilitas rehabilitasi (Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat)	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi narkotika yang memenuhi standar	8	7	5	5	5
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat	1	1	1	1	1

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
6.	Peningkatan Kemampuan Tenaga Rehabilitasi (Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah)	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas lembaga rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi	5	5	5	5	5
			Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10	5	5	5	5
7.	Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks mutu layanan rehabilitasi	NA	NA	NA	NA	NA
			Indeks kepuasan layanan rehabilitasi narkoba	NA	3,2	3,2	3,2	3,2
KERANGKA RENCANA KINERJA BIDANG PEMBERANTASAN								
8.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Jumlah jaringan sindikat peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	Jumlah jaringan sindikat peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	NA	NA	NA	NA	NA
9.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkoba	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21	1	1	1	2	2
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	NA	NA	NA	NA	NA
10.	Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat, dan Lintas Darat	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan prekursor di pintu masuk dan lintas batas wilayah Indonesia	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor di pintu masuk dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21	NA	NA	NA	NA	NA
11.	Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran	Meningkatnya penangkapan DPO dan TO kasus tindak pidana narkoba, prekursor narkoba dan TPPU	Persentase tersangka DPO kasus tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta TPPU yang tertangkap	NA	NA	NA	NA	NA
			Persentase target operasi (TO) kasus tindak pidana narkoba, prekursor narkoba dan TPPU uang tertangkap	NA	NA	NA	NA	NA

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
12.	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor	Meningkatnya pengawasan distribusi psikotropika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkotika yang P-21	NA	NA	NA	NA	NA
			Nilai kepatuhan importir terdaftar dan pengguna akhir dalam distribusi atau peredaran prekursor non-farmasi	NA	NA	NA	NA	NA
			Jumlah pengungkapan kasus tindak pidana psikotropika	NA	NA	NA	NA	NA
13.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	NA	NA	NA	NA	NA
14.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	NA	NA	NA	NA	NA
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	NA	NA	NA	NA	NA
KERANGKA RENCANA KINERJA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								
1.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Sleman	80	82	84	86	90
			Nilain Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Sleman	90	90	90	90	90
2.	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya pengelolaan SDM, organisasi dan tatalaksana yang efektif	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Layanan Kepegawaian	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
			Persentase penilaian atas efektifitas penataan tatalaksana	74	78	82	86	90
3.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai kualitas laporan keuangan satuan kerja	100	100	100	100	100
			Indeks kepatuhan pembayaran belanja pegawai	NA	NA	NA	NA	NA

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
4.	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Meningkatnya pelayanan umum secara maksimal	Indeks kualitas penyelenggaraan ketatausahaan	3	3.1	3.2	3.3	3.4
			Indeks kualitas pengadaan dan pengelolaan Barang/Jasa	NA	NA	NA	NA	NA
5.	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Meningkatnya fungsi layanan publikasi kelembagaan dan keprotokoleran yang optimal	Indeks layanan kehumasan	3	3.5	4	4.5	5
			Persentase tingkat kepuasan pelayanan keprotokoleran	80	85	87	90	92

LAMPIRAN
MATRIK KERANGKA PENDANAAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020-2024

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Alokasi Pendanaan (dalam juta rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024
KERANGKA RENCANA KINERJA BIDANG PENCEGAHAN								
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	200.000	205.100	200.000	200.000	200.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan faktor risiko penyalahgunaan narkoba	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
KERANGKA RENCANA KINERJA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT								
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	200.482	200.482	200.482	200.482	200.482
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Status keterpulihan kawasan rawan dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	NA	NA	NA	NA	NA
KERANGKA RENCANA KINERJA BIDANG REHABILITASI								
5.	Pengembangan fasilitas rehabilitasi (Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat)	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi narkoba yang memenuhi standar	11.525	11.525	11.525	11.525	11.525
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi Pendanaan (dalam juta rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024
6.	Peningkatan Kemampuan Tenaga Rehabilitasi (Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah)	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas lembaga rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi	126.332	126.332	126.332	126.332	126.332
			Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	37.750	37.750	37.750	37.750	37.750
7.	Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks mutu layanan rehabilitasi	NA	NA	NA	NA	NA
			Indeks kepuasan layanan rehabilitasi narkoba	NA	NA	NA	NA	NA
KERANGKA RENCANA KINERJA BIDANG PEMBERANTASAN								
8.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Jumlah jaringan sindikat peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	Jumlah jaringan sindikat peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	NA	NA	NA	NA	NA
9.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkoba	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21	60.000	60.000	60.000	123.676	123.676
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	NA	NA	NA	NA	NA
10.	Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat, dan Lintas Darat	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan preskursor di pintu masuk dan lintas batas wilayah Indonesia	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor di pintu masuk dan lintas batas wilayah Indonesia yang P-21	NA	NA	NA	NA	NA
11.	Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran	Meningkatnya penangkapan DPO dan TO kasus tindak pidana narkoba, prekursor narkoba dan TPPU	Persentase tersangka DPO kasus tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta TPPU yang tertangkap	NA	NA	NA	NA	NA
			Persentase target operaasi (TO) kasus tindak pidana narkoba, prekursor narkoba dan TPPU uang tertangkap	NA	NA	NA	NA	NA

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi Pendanaan (dalam juta rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024
12.	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor	Meningkatnya pengawasan distribusi psikotropika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana prekursor narkotika yang P-21	NA	NA	NA	NA	NA
			Nilai kepatuhan importir terdaftar dan pengguna akhir dalam distribusi atau peredaran prekursor non-farmasi	NA	NA	NA	NA	NA
			Jumlah pengungkapan kasus tindak pidana psikotropika	NA	NA	NA	NA	NA
13.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	NA	NA	NA	NA	NA
14.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	NA	NA	NA	NA	NA
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	NA	NA	NA	NA	NA
KERANGKA RENCANA KINERJA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								
1.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Sleman	12.834	12.834	12.834	12.834	12.834
			Nilain Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Sleman					
2.	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya pengelolaan SDM, organisasi dan tatalaksana yang efektif	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Layanan Kepegawaian	19.320	19.320	51.820	61.820	86.820
			Persentase penilaian atas efektifitas penataan tatalaksana					
3.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai kualitas laporan keuangan satuan kerja	124.164	124.164	124.164	124.164	124.164
			Indeks kepatuhan pembayaran belanja pegawai					

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi Pendanaan (dalam juta rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024
4.	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Meningkatnya pelayanan umum secara maksimal	Indeks kualitas penyelenggaraan ketatausahaan	1.189.156	1.088.256	1.127.256	1.076.256	1.168.256
			Indeks kualitas pengadaan dan pengelolaan Barang/Jasa					
5.	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Meningkatnya fungsi layanan publikasi kelembagaan dan keprotokoleran yang optimal	Indeks layanan kehumasan	62.210	62.210	62.210	62.210	62.210
			Persentase tingkat kepuasan pelayanan keprotokoleran					